



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SALUSRA WIJAYA**
2. Jabatan : **DIREKTUR KEUANGAN**
3. NHK : **647368**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 43.387.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/298 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 5.050.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/90 m2 di BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 321 m2/150 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
6. Bangunan Seluas 76 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000
7. Bangunan Seluas 102 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.850.000.000
8. Tanah Seluas 735 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.050.000.000
9. Bangunan Seluas 177.7 m2 di KIARAVILLE CONDOMINIUM, MALAYSIA, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
10. Tanah Seluas 600 m2 di TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 687.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.000.000.000



1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	393.141.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	9.091.664.065
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.935.677.877
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.425.000.000
Sub Total	Rp.	92.232.482.942
III. HUTANG	Rp.	2.594.032.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	89.638.450.942

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.